

**AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA**

(Studi pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**



Syaeful Fahri

3117 29987

JURUSAN AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

“YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA”

YOGYAKARTA

2019/2020

SKRIPSI
AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS, DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA
(Studi pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SYAEFUL FAHRI

No Induk Mahasiswa: 3117 29987

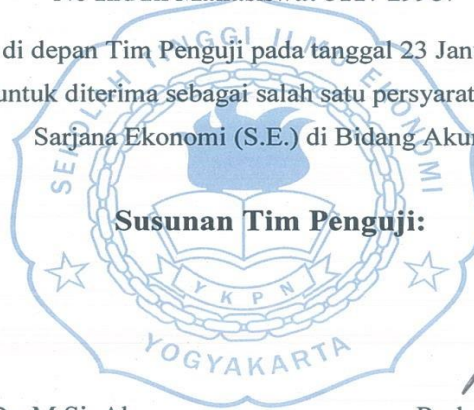
telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Atika Jauharja Hatta, Dr, M.Si, Ak.



Penguji



Rudy Badrudin, Dr, M.Si

Yogyakarta, 23 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

SYAEFUL FAHRI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

Jalan Seturan Yogyakarta 55281

e-mail: Syaeiful.fabri@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability, effectiveness, and transparency in village fund management in the village in Ayah District. In this study the authors used a sample of 70 respondents. The respondent is a village officials in the Ayah District selected using by random sampling. The type of data used in this study is subject data, the nature of the data used is quantitative data, the source of the data used is primary data and the method of data collection in this study is using a survey with an instrument in the form of a questionnaire. The test used to test the research instrument is a validity test and a reliability test. For data analysis techniques using descriptive statistics, classic assumption tests and multiple regression analysis. The results of this study indicate that the independent variables (accountability, effectiveness, and transparency) can explain the dependent variable village fund management by 27,2% and the remaining 72,8% are explained by other variables. Based on the results of hypothesis testing partially independent variables transparency significantly positive influence the village fund management, while the accountability and effectiveness variable does not significantly influence the village fund management.

Keywords: Village Fund, Accountability, Effectiveness, Transparency, and Village Fund Management

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Salahsatu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan, kembali mendapatkan tantangan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Salahsatu isu penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi alokasi dan yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa, namun sebaliknya di sisi yang lain akan menimbulkan potensi korupsi yang besar dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa yang belum baik ditambah proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah. Desa adalah perwujudan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kesejahteraan desa adalah perwujudan demokrasi ekonomi bagi rakyat banyak, GDP desa dan pendapatan per kapita desa adalah perwujudan tingkat hidup sejati bangsa Indonesia, karena itu pembangunan desa yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan pembangunan nasional.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan itikad negara untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa, hal ini ditandai dengan pemilihan umum calon kepala desa, anggaran desa, dan pembuatan peraturan desa. Otonomi yang luas ini diharapkan menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana kualitas pengelolaan pemerintah di level yang rendah yaitu desa. Sehingga ketika transparansi, akuntabilitas dan efektivitas di desa bisa terwujud maka pembangunan nasional bisa tercapai melalui desa.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan secara fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Halim, 2012:366). Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintah adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, efektif berarti dikelola secara baik dan benar, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antar *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principals*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akurat, efektif, dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. Tahun 2014 pasal 18).

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjabar dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2009: 20), pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Hal ini didukung dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengembangan Hipotesis

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

demikian semakin baik pengelolaan dana desa tersebut di mata masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada 4 (empat) kategori yang memengaruhi efektivitas yakni: 1) sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi; 2) sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi; 3) sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan; 4) kebijakan dan praktek manajerial (Steers, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa dapat diukur dengan optimalisasi tujuan dari pemerintah desa. Semakin tinggi tujuan yang dapat dicapai oleh pemerintah desa maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya, dengan demikian semakin baik pengelolaan dana desa tersebut maka semakin efektif tujuan yang dicapai oleh pemerintah desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Efektivitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka semakin tinggi transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, dengan demikian semakin baik pengelolaannya di desa semakin baik di mata masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang analisisnya dilakukan terhadap data numerik yang diperoleh dari kuesioner dan diolah menggunakan metode statistika. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang melaksanakan pengelolaan dana desa.

Sampel Penelitian

Besar sampel pada penelitian dihitung dengan menggunakan rumus sederhana untuk populasi kecil yaitu lebih kecil dari 10.000 (Notoatmodjo, 2010). Ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam menggunakan rumus Slovin. Menurut Wahyudin (2015), menggunakan rumus ini ukuran populasi penelitian (N) dan rentang toleransi kekeliruan yang dapat diterima (e). Adapun rumus tersebut sebagai berikut :

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = besar sampel

N = besar populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel

Dengan demikian jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{178}{1 + 178(0,1)^2}$$

$$n = \frac{178}{2,78}$$

$$n = 64.028$$

$$n = 64$$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 64 perangkat desa wilayah kecamatan Ayah. Untuk menghindari *missing* sampel kemudian ditambah 10% dari jumlah sampel yang dihitung sehingga jumlah sampel menjadi 70 perangkat desa.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara *random sampling* atau acak. Menurut Wahyudin (2015) bahwa, sampel *random* adalah sampel yang diambil atau dicuplik dari populasi, dengan menggunakan prinsip bahwa semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih sebagai anggota sampel.

Pengambilan sampel dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Menentukan Cluster

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Cluster dalam penelitian ini adalah cluster dari perangkat desa yang ada di Kecamatan Ayah.

2) Pemilihan sampel data cluster

Dari 18 cluster tersebut akan diambil sejumlah 70 perangkat desa. Proses pemilihan sampel cluster dilakukan secara *random* dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah populasi cluster}}{\text{Jumlah populasi seluruh cluster}} \times \text{sampel}$$

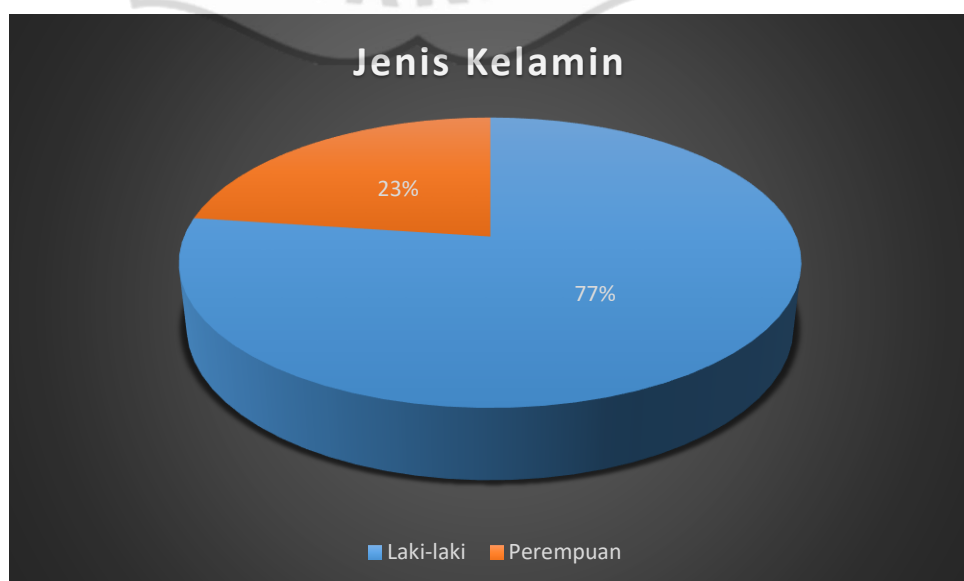
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

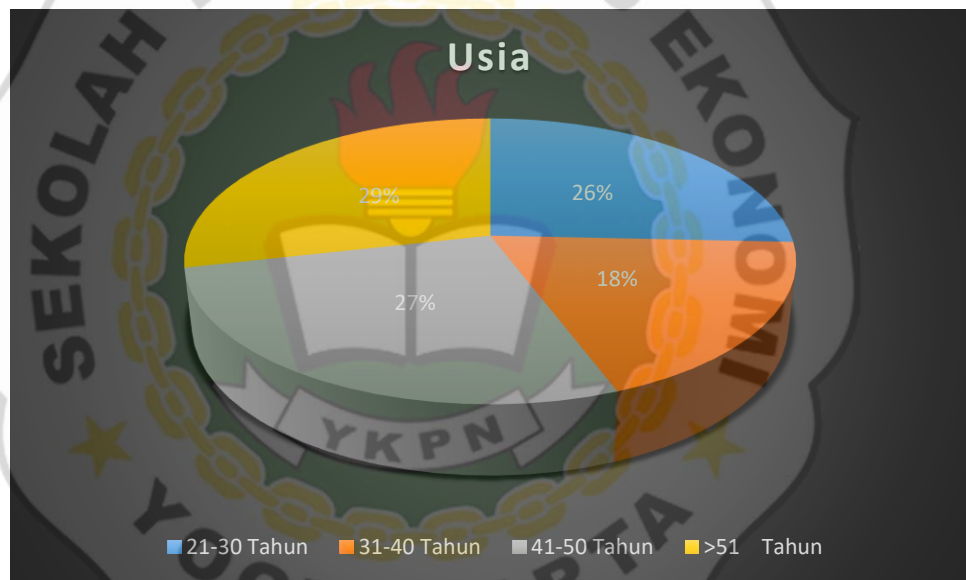
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-laki	54	77%
Perempuan	16	23%
Jumlah	70	100%



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

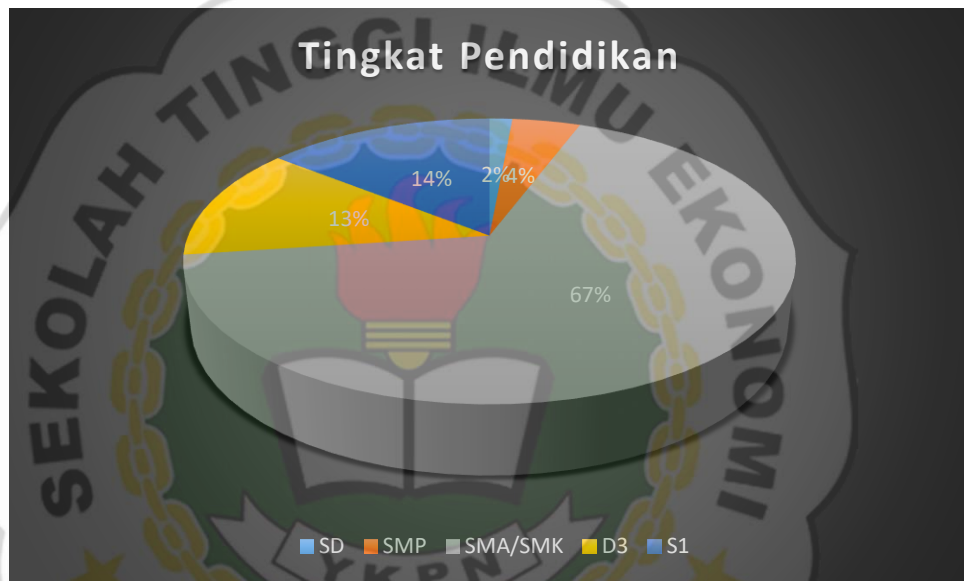
Usia	Jumlah Responden	Presentase
21-30 Tahun	18	26%
31-40 Tahun	13	18%
41-50 Tahun	19	27%
>51 Tahun	20	29%
Jumlah	70	100%



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SD	1	2%
SMP	3	4%
SMA/SMK	47	67%
D3	9	13%
S1	10	14%
Jumlah	70	100%



Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58036906
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.049
	Negative	-.068

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Test Statistic	.068
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan Hasil Uji Normalitas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.200 dan tingkat signifikan 0.05 yang artinya nilai probabilitas lebih besar daripada tingkat signifikan, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel X	<i>Tolerance</i>	VIF	Keputusan
Akuntabilitas (X1)	0,865	1,157	Tidak Multikolinearitas
Efektivitas (X2)	0,994	1,006	Tidak Multikolinearitas
Transparansi (X3)	0,861	1,162	Tidak Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* > 0,10 = tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF < 10,00 = tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh variabel independen yaitu Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Maka model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan baik karena tidak terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antara variabel independen (tidak terjadi gejala multikorelasi).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel X	(Sig) Variabel	Keputusam
Akuntabilitas (X1)	0,127	Tidak Heteroskedastisitas
Eefektivitas (X2)	0,487	Tidak Heteroskedastisitas
Transparansi (X3)	0,164	Tidak Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh variabel independen yaitu Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Maka model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan baik.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.282	10.194		3.363	.001
	Total_AK	-.235	.134	-.198	-1.751	.085
	Total_EF	-.001	.112	-.001	-.009	.993
	Total_TR	.489	.133	.415	3.669	.000

$$Y = 34.282 - 0.235X_1 - 0.001X_2 + 0.489X_3 + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 34.282 hal tersebut apabila nilai dari variabel akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi sama dengan 0 maka nilai variabel pengelolaan dana desa sebesar 34.282.
2. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar -0.235 bernilai negatif menunjukkan hubungan negatif antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi akuntabilitas maka akan semakin rendah pengelolaan dana desa.
3. Koefisien regresi variabel efektivitas sebesar -0.001 bernilai negatif menunjukkan hubungan negatif antara efektivitas dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi efektivitas maka akan semakin rendah pengelolaan dana desa.
4. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0.489 bernilai positif menunjukkan hubungan positif antara transparansi dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pengelolaan dana desa.

Uji Hipotesis

Uji Parsial T

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial T

Model	T	Sig.	Hipotesis
(Constant)	3.363	.001	

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akuntabilitas (X1)	-1.751	.085	Tidak Terdukung
Efektivitas (X2)	-0.009	.993	Tidak Terdukung
Transparansi (X3)	3.669	.000	Terdukung

a. Pengaruh Variabel Akuntabilitas

Pada tabel 4.17 hasil uji t variabel akuntabilitas menunjukkan t_{hitung} sebesar -1,751 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,996 ($\alpha=0,05/2$; $df=70-3-1$) dan nilai signifikan sebesar 0,085 lebih besardari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa H_1 : akuntabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa adalah tidak terdukung.

b. Pengaruh Variabel Efektivitas

Pada tabel 4.17 hasil uji t variabel efektivitas menunjukkan t_{hitung} sebesar -0,009 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,996 ($\alpha=0,05/2$; $df=70-3-1$) dan nilai signifikan sebesar 0,993 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa H_2 : efektivitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa adalah tidak terdukung.

c. Pengaruh Variabel Transparansi

Pada tabel 4.17 hasil uji t variabel transparansi menunjukkan t_{hitung} sebesar 3,669 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,996 ($\alpha=0,05/2$; $df=70-3-1$) dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengelolaandana desa. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa H₃: transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa adalah terdukung.

Uji Simultan F

Tabel 4.15

Hasil Uji Simultan F (Uji F)

Model	df	F	Sig.
1 Regression	3	8.215	.000
Residual	66		
Total	69		

Hasil uji F padatabel diatas dapat diketahui bahwa F_{-hitung} sebesar 8,215 lebih besar dari F_{-tabel} sebesar 2,74 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	.521	.272

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,272 hal ini mengandung arti bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dapat menjelaskan variabel dependen pengelolaan dana desa sebesar 27,2% dan sisanya 72,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian ini hasil uji t menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,085 > 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} -1,751 < 1,996$ dari t_{tabel} artinya variabel akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H_1 tidak terdukung.

2. Pengaruh Efektivitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian ini hasil uji t menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,993 > 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} -0,009 < 1,996$ dari t_{tabel} artinya variabel efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H_2 tidak terdukung.

3. Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian ini hasil uji t menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} 3,669 > 1,996$ dari t_{tabel} artinya variabel transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H_3 terdukung.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat analisis perhitungan statistik yaitu IBM SPSS versi 25. Penelitian ini menggunakan data sampel sebanyak 70 responden perangkat desa di desa pada Kecamatan Ayah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.16 nilai signifikansi 0,085 lebih dari 0,05 maka H_1 tidak terdukung.
2. Efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.16 nilai signifikansi 0,993 lebih dari 0,05 maka H_2 tidak terdukung.
3. Transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.16 nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 maka H_3 terdukung.
4. Akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti akan memberikan beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perlunya pemerintah desa untuk mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan keuangan desa, agar penggunaan dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan perekonomian desa. Perlunya regenerasi untuk perangkat desa dengan mengangkat pemuda-pemuda asli desa yang memiliki jenjang pendidikan yang baik, yang diharapkan menjadi lebih meningkatnya pemahaman pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Desa di Kecamatan Ayah masih belum menggunakan *website* untuk memaparkan hasil kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Alangkah lebih baik bagi desa untuk membuat *website* agar masyarakat/pengguna laporan keuangan lebih mudah mengakses laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, dan Kusufi Syam Muhammad. 2012. *Teori, konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Shende, suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Steers, Richard M. 1997. *Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang. Unnes Pres. Edisi I 2015.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M, Donnely Jr, James H. 1995. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No,113 Tahun 2014 Tentang Pengeolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Bappenas & Depdagri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta.
- Saryono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hatta. 2011. *Model of Information System Operation Based on Technology Acceptance Model for Micro Financial Institutions*. *Journal of Economics, Business and Accounting Ventura Volume 14, No. 3, December 2011*.
- Sahid Raharjo. 2014. *Uji Regresi Sederhana dengan SPSS Lengkap* diakses dari <https://www.konsistensi.com/2014/06/uji-regresi-sederhana-dengan-spss.html> diakses 25 Oktober 2019.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- <https://www.kemenkeu.go.id> diakses 5 Oktober 2019.
- <https://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses 5 Oktober 2019.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-pintar-dana-desa> diakses 6 Oktober 2019.
- Kurniawan. 2016. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Dimensi Volume 13 Nomer 2 September 2016: 1-12*.
- Zyen, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1): 52-62.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 225-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Boedijono, Wicaksono, Puspita, Bidhari. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 – 20.
- Hanifah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015)*.
- Ismail, Widagdo, Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Dimensi Vol. 19, No. 2, Agustus 2016*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Saputra. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Dimensi Vol. 6, No. 1 (2016)*.
- Wida. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Dimensi Vol. IV (2) : 148-152*.
- Wardana. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Aliya, Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. 8(2): 97 – 189.
- Azlina, Hasan, Desmiyawati, Muda. 2017. *The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau)*. *International Journal of Economic Research*. ISSN : 0972-9380. Vol. 14 No. 12.
- Taufiqurakhman, Andriansyah. 2018. *Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance*. *International Journal of Economic Research*. ISSN : 2549-5283.